

Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Di Pulau Jawa

Aniek Juliarini

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI
ajuliarini@gmail.com

Abstract

The provinces of Java have high Human Development Index (HDI). In 2016, Jakarta Capital Special Region (DKI Jakarta) and Special Region of Yogyakarta (DI Yogyakarta) Province, are ranked in the first and second of national Human Development Indeks (HDI). This study analyzes the performance of regional income to HDI in the provinces of Java including DKI Jakarta, West Java, Banten, DI Yogyakarta, Central Java, and East Java, and then compares it relatively to the nationally achievement. The research method is descriptive qualitative by analyzing descriptively the results of data that are processed econometrically. The research data are data of regional income and HDI data for year 2010-2016, taken from the Central Bureau of Statistics. The linear regression is done by conveying the regional income as the independent variable and HDI as the dependent variable. The study shows that there is a positive and very strong correlation with a 99% confidence level between the regional income towards HDI in all provinces of Java. Judging from the magnitude of the increase in HDI for each additional income, DIY province has the best performance, followed by Banten, East Java, Central Java, West Java and DKI Jakarta. The performance of all provinces of Java are above of the achievement nationally.

Keywords: regional income, regional performance, Human Development Indeks

Abstrak

Provinsi di pulau Jawa merupakan provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Bahkan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menempati ranking pertama dan kedua IPM secara nasional pada tahun 2016. Penelitian ini menganalisis bagaimana kinerja pendapatan daerah terhadap IPM di provinsi-provinsi di Pulau Jawa meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kemudian membandingkannya secara relative dengan capaian nasional. Pulau Jawa dipilih karena 58% Produk Domestik Bruto Indonesia berada di Jawa dan lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif yakni dengan menganalisis secara deskriptif terhadap hasil data yang diolah secara ekonometris. Data penelitian berupa data pendapatan daerah dan IPM provinsi tahun 2010—2016 diambil dari Badan Pusat Statistik. Regresi linier dilakukan dengan pendapatan daerah sebagai variable bebas dan IPM sebagai variable terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan sangat kuat dengan tingkat kepercayaan 99%, antara pendapatan daerah dengan IPM di seluruh provinsi di pulau Jawa. Dilihat dari besaran peningkatan IPM untuk setiap tambahan pendapatan maka provinsi DI Yogyakarta memiliki kinerja yang paling baik, diikuti Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan kinerja di atas rata-rata provinsi secara nasional.

Kata Kunci: pendapatan daerah, kinerja daerah, Indeks Pembangunan Manusia

PENDAHULUAN

Salah satu tolok ukur meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah,

IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (Badan Pusat Statistik). IPM yang tinggi menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula dan dapat diartikan sebagai keberhasilan pemerintahnya dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Oleh karena itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara.

Smit Sangh (2016) melakukan penelitian berjudul “*Determinants of Human Development Index: A Cross-Country Empirical Analysis*”. Dalam makalahnya, Sangh menyimpulkan tentang faktor-faktor penentu indeks pembangunan manusia (IPM) seperti PDB per-kapita, tingkat melek huruf, harapan hidup saat lahir, Gini indeks, tingkat kesuburan dan emisi Co2 signifikan dalam analisis regresi empiris. Dalam analisis kebijaksanaan wilayah, dikemukakan bahwa Eropa & Asia Tengah dan Amerika Latin, dan Karibia memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi, sementara Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih rendah. Peningkatan IPM tersebut dapat dicapai melalui tiga dimensi - Indeks Pendidikan, Indeks Pendapatan, dan Indeks Kesehatan.

Di Indonesia, peningkatan pendapatan daerah dan IPM pada provinsi-provinsi di seluruh Indonesia tidak berjalan seragam. Hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kebijakan pemerintah daerah setempat, jumlah penduduk, luas wilayah, dan lain-lain. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa IPM tahun 2016 rata-rata seluruh provinsi di Indonesia adalah 70.18. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan IPM tertinggi yakni 79,60 sementara Provinsi DI Yogyakarta berada di urutan kedua dengan IPM 78,38. Pendapatan daerah provinsi seluruh Indonesia rata-rata pada tahun 2016 mencapai Rp8.105 milyar, dengan pendapatan tertinggi DKI Jakarta dan terendah provinsi Gorontalo.

Korelasi pendapatan daerah dengan IPM pada masing-masing provinsi sangat berbeda. Pendapatan daerah yang tinggi tidak selalu diikuti dengan IPM yang tinggi pula. Hasil kinerja pembangunan ekonomi di Indonesia memberikan hasil yang berbeda-beda antar daerah. Kondisi ini pula yang terjadi antarprovinsi di Indonesia, di mana perbedaan hasil-hasil pembangunan ekonomi memperlihatkan adanya suatu ketimpangan ekonomi antarprovinsi yang cukup besar (Kusriyawanto, 2014). Yuliani, Tutik (2015) dalam penelitiannya berjudul “*Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan AntarKabupaten di Kalimantan Timur*” mengemukakan hasil analisisnya tentang ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2012. Disimpulkan bahwa peningkatan ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan antarwilayah. Sementara itu BPS mengemukakan bahwa perbedaan antar daerah merupakan suatu konsekuensi yang logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya. Sebaran sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi, pertumbuhan pusat perdagangan dan industri yang terkonsentrasi di beberapa daerah telah

menimbulkan adanya kantong-kantong pertumbuhan, sehingga ketimpangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) antar daerah sangat tinggi.

Dengan semakin bertambahnya pendapatan daerah dan bervariasinya pendapatan antardaerah provinsi di Indonesia, menjadi menarik untuk dikaji bagaimanakah pengaruh pendapatan daerah provinsi terhadap IPM khususnya di provinsi-provinsi di pulau Jawa. Hal ini mengingat bahwa 58% Produk Domestik Bruto Indonesia berada di Jawa dan lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa (Aziza, Kurnia Sari, 2017). Selain meneliti seberapa besar pengaruh pendapatan daerah provinsi terhadap peningkatan IPM, perlu diteliti pula bagaimana keberhasilan relative (kinerja) provinsi-provinsi tersebut dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui pencapaian IPM. Rumusan penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh pendapatan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi-provinsi di pulau Jawa, dan bagaimana kinerja masing-masing provinsi dalam pencapaian IPM-nya?”. Wilayah penelitian meliputi seluruh provinsi di pulau Jawa yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis korelasi antara pendapatan daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan nasional Indonesia;
2. menganalisis berapa besar kinerja pendapatan terhadap IPM di provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan nasional Indonesia;
3. mengevaluasi kinerja masing-masing provinsi di Pulau Jawa dengan melakukan komparasi relatif terhadap kinerja provinsi secara nasional.

KAJIAN LITERATUR

Beberapa penelitian terdahulu mengenai indeks pembangunan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah dilakukan baik itu dengan menggunakan metode deskriptif, statistik maupun ekonometri. Gustav Ranis (2005) dalam artikelnya “*Human Development: Beyond the HDI*” mengidentifikasi seperangkat ukuran pilihan yang lebih luas (11 variabel) yang mungkin memenuhi syarat sebagai bagian dari Human Development dan untuk menganalisis seberapa baik atau buruk daftar pilihan yang lebih luas dalam IPM dengan menggunakan data lintas negara internasional. Makalah ini telah mengeksplorasi cara-cara yang mungkin untuk memperbesar pemahaman dalam pengukuran Pembangunan Manusia.

Nujum, Syamsu, dkk (2013) dalam penelitiannya berjudul “*Analysis Of The Reciprocal Relationship Of Local Government Expenditure Towards Human Development Index (HDI) And Its Influence On Economic Performance In South Sulawesi*” menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di kota Makassar rata-rata 78,11 persen selama periode 2008-2013, lebih tinggi dari Kabupaten Takalar dan Gowa, Maros. Indeks pembangunan manusia Kota Makassar tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kinerja saat ini. Di Takalar, Gowa, dan Maros, secara bersamaan pinjaman dan HDI berpengaruh signifikan, tetapi menunjukkan pengaruh sebagian secara proporsional dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan ekonomi.

Melliana, Ayunanda, dkk (2013) melakukan penelitian “*Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur*” melakukan pengolahan data dengan menggunakan regresi data panel yaitu gabungan antara data cross section dan time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan IPM dapat dilakukan dengan cara meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS), jumlah sarana kesehatan, persentase rumah tangga dengan akses air bersih, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan PDRB perkapita.

Iskandar, Azwar and Subekan, Achmat (2014) melakukan penelitian “*Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-2012)*”. Penelitian ini menguji pengaruh kinerja keuangan lokal terhadap kesejahteraan sosial di kabupaten dan kota Sulawesi Selatan pada tahun 2008-2012. Kinerja keuangan lokal sebagai variabel independen diwakili oleh tingkat otonomi, efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan lokal. Kesejahteraan sosial sebagai variabel tergantung diwakili oleh IPM. Hasil empiris menunjukkan bahwa kinerja keuangan lokal secara simultan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Tingkat otonomi daerah secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Sementara itu, efektivitas kinerja keuangan lokal memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial, dan efisiensi kinerja keuangan daerah secara parsial memiliki efek negatif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

Salah satu tujuan analisis data ialah untuk memperkirakan/memperhitungkan besarnya efek atau pengaruh kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Setiap kebijakan, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, selalu dimaksudkan untuk mengadakan perubahan sesuai dengan keinginan/harapan. (Supranto, 2009). Dapat dicontohkan misalnya peningkatan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, atau peningkatan pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk keperluan evaluasi suatu kebijakan sering kali ingin diketahui besarnya efek kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya, misalnya efek perubahan pendapatan terhadap perubahan tingkat hidup masyarakat. Kejadian-kejadian tersebut, untuk keperluan analisis, bisa dinyatakan dalam nilai variabel. Untuk analisis dua kejadian digunakan dua variabel, yaitu variabel X (misalnya pendapatan) dan variabel Y (misalnya Indeks Pembangunan Manusia sebagai outcome dari pendapatan). Apabila dua variabel tersebut mempunyai hubungan (korelasi) maka perubahan nilai variabel yang satu (X) akan memengaruhi nilai variabel lainnya (Y). Hubungan kedua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi, misalnya $Y = f(X)$. Jika bentuk fungsinya sudah diketahui, dengan mengetahui nilai dari satu variabel (X) maka nilai variabel lainnya (Y) dapat diperkirakan. Untuk membuat ramalan Y dari variabel X maka X dan Y harus mempunyai hubungan yang kuat. Kuat tidaknya hubungan X dan Y diukur dengan koefisien korelasi, sedangkan besarnya pengaruh X ke Y diukur dengan koefisien regresi. X merupakan variabel bebas (*independent variable*) dan Y merupakan variabel terikat (*dependent variable*).

Ahli ekonomi atau ahli-ahli bidang lainnya sering menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui erat tidaknya hubungan antarvariabel. Apabila ternyata hasil analisis menunjukkan hubungan yang cukup erat maka analisis dilanjutkan ke analisis regresi sebagai alat meramalkan (*forecasting*) yang sangat berguna untuk perencanaan. (Supranto, 2009). Analisis korelasi yang mencakup dua variabel, X dan Y, disebut analisis korelasi linier sederhana, sedangkan yang mencakup lebih dari dua variabel disebut analisis korelasi linier berganda. Terdapat beberapa macam teknik korelasi, yaitu korelasi Pearson Product Moment (r), korelasi rasio (n), Korelasi Spearman Rank (p), korelasi Biserial (rb), dan sebagainya. (Sugiyono, 2014).

METODE PENELITIAN

1. Data yang digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang merupakan gabungan antara data cross-section provinsi dengan data series tahun 2010—2016. Data pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016 diperoleh dari laman BPS. Data pendukung analisis berupa data wilayah dan jumlah penduduk diperoleh dari laman Kementerian Dalam Negeri, dan data lainnya diperoleh dari berbagai sumber yaitu penelitian terdahulu, buku, dan sumber-sumber lainnya.

2. Variabel operasional

Variabel operasional yang digunakan adalah:

X= pendapatan , sebagai variabel bebas (independent variabel)

Y = Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel terikat (dependent variabel)

Setelah dilakukan uji hubungan dan uji korelasi, kemudian dilakukan regresi antara pendapatan daerah propinsi dengan IPM untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa dan untuk rata-rata nasional. Selanjutnya diperbandingkan, apakah koefisien regresi provinsi yang bersangkutan lebih tinggi atau lebih rendah dari koefisien regresi rata-rata nasional.

3. Metode analisis data

Metode analisis data dilakukan dengan analisis korelasi untuk mengetahui erat tidaknya hubungan antarvariabel. Untuk melihat arah hubungan dan kekuatan hubungan antara pendapatan dengan IPM di ke enam provinsi di Pulau Jawa, dilakukan dengan Uji Normalitas dan Uji Korelasi. Panduan interpretasi hasil uji hipotesis berdasarkan kekuatan korelasi, nilai p, dan arah korelasi ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Panduan Interpretasi Hasil Uji Hipotesis Berdasarkan Kekuatan Korelasi, Nilai p, dan arah korelasi

NO	PARAMETER	NILAI	INTERPRETASI
1	Kekuatan korelasi (r)	0,00—0,199 0,20—0,399 0,40—0,599 0,60—0,799 0,80—1,000	Sangat lemah Lemah Sedang Kuat Sangat kuat
2	Nilai p	P < 0,05 P > 0,05	Terdapat korelasi yang bermakna antara dua variabel yang diuji Tidak terdapat korelasi yang bermakna antara dua variabel yang diuji
3	Arah korelasi	+ (positif) _ (negative)	Searah. Semakin besar nilai satu variabel semakin besar pula nilai variabel lainnya. Berlawanan arah. Semakin besar nilai satu variabel semakin besar pula nilai variabel lainnya.

Sumber: Dahlan (2001)

Apabila ternyata hasil analisis menunjukkan hubungan yang cukup erat maka analisis dilanjutkan ke analisis regresi linier sederhana sebagai alat meramalkan (*forecasting*). Untuk mengukur dan membandingkan kinerja pemerintah daerah provinsi yang dijadikan obyek penelitian, dilakukan analisis data sebagai berikut.

- a. Menguji kekuatan korelasi antara variabel dependent dan variabel independent pada masing-masing provinsi dan pada Indonesia.
- b. Menghitung variabel-variabel penelitian per-provinsi dan Indonesia sesuai formula yang digunakan.
- c. Menginterpretasikan persamaan regresi yang terbentuk untuk masing-masing provinsi dan Indonesia
- d. Membandingkan secara relative besaran hubungan antara pendapatan daerah dan IPM semua provinsi dengan nasional Indonesia secara deskriptif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil proses regresi linier dengan tingkat kepercayaan 99% ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Regresi Linier Sederhana

NO	PROVINSI	KONSTANTA (a)	KOEFISIEN REGRESI (b)
1	DKI Jakarta	74,297	0,090
2	Jawa Barat	63,954	0,223
3	Banten	65,596	0,637
4	Jawa Tengah	64,482	0,266
5	DIY	73,935	1,051
6	Jatim	62,344	0,301
7	Nasional	63,797	0,023

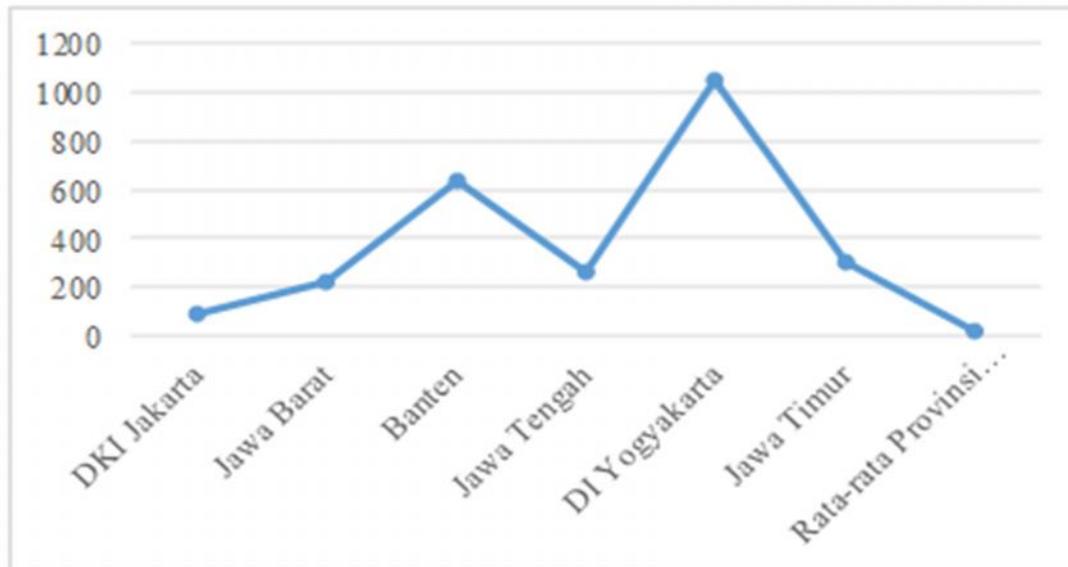
Sumber: Data, diolah

Dari hasil olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kurun waktu tahun 2010—2016, hubungan antara pendapatan dengan IPM di masing-masing provinsi di Pulau Jawa adalah sebagai berikut.

- a. Provinsi DKI Jakarta: $Y=74,297+0,094 X$. Hal ini berarti setiap tambahan pendapatan satu trilyun di Provinsi DKI Jakarta, meningkatkan IPM sebesar 0,094.
- b. Provinsi Jawa Barat: $Y = 63,954 + 0,2235 X$. Hal ini berarti setiap tambahan pendapatan satu trilyun di Provinsi Jawa Barat, meningkatkan IPM sebesar 0,2235.
- c. Provinsi Banten: $Y = 65,596 + 0, 6375 X$. Hal ini berarti setiap tambahan pendapatan satu trilyun di Provinsi Banten, meningkatkan IPM sebesar 0,6375.
- d. Provinsi Jawa Tengah: $Y = 64,482+ 0, 2664$. Hal ini berarti setiap tambahan pendapatan satu trilyun di Provinsi Jawa Tengah, meningkatkan IPM sebesar 0,2664.
- e. Provinsi DI Yogyakarta: $Y = 73,935 + 1,052 X$. Hal ini berarti setiap tambahan pendapatan satu trilyun di Provinsi DI Yogyakarta, meningkatkan IPM sebesar 1,052.
- f. Provinsi data Jawa Timur: $Y = 62,344 + 0,3010 X$. Hal ini berarti setiap tambahan pendapatan satu trilyun di Provinsi Jawa Timur, meningkatkan IPM sebesar 0,3010.
- g. Provinsi secara nasional: $Y = 63,797 + 0,0225 X$. Hal ini berarti setiap tambahan pendapatan satu trilyun di provinsi-provinsi di Indonesia, rata-rata meningkatkan IPM sebesar 0,0225.

Selanjutnya kinerja provinsi-provinsi wilayah penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.
Kinerja Provinsi di Pulau Jawa Dalam Hubungan Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: Data, diolah

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa kinerja pemerintah provinsi dalam peningkatan IPM, berurutan dari yang paling tinggi adalah: 1). Provinsi DI Yogyakarta, 2). Provinsi Banten, 3). Provinsi Jawa Timur, 4). Provinsi Jawa Tengah, 5). Provinsi Jawa Barat, dan 6). Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan kinerja di atas rata-rata secara nasional seluruh provinsi di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh provinsi di pulau Jawa memiliki kinerja “Baik” dalam pencapaian IPM. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab perbedaan koefisien regresi pada provinsi-provinsi tersebut adalah jumlah penduduk yang berbeda, luas wilayah yang berbeda, atau kebijakan arah pembangunan yang berbeda.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan daerah provinsi di Pulau Jawa memiliki korelasi positif dan sangat kuat terhadap IPM, dengan tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti jika pendapatan daerah bertambah maka IPM meningkat. Di semua provinsi di Pulau Jawa, setiap peningkatan pendapatan meningkatkan IPM, namun besaran peningkatan IPM pada masing-masing provinsi berbeda. Dilihat dari besaran peningkatan IPM untuk setiap tambahan pendapatan maka provinsi DIY memiliki kinerja yang paling bagus, diikuti Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Namun demikian, seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan kinerja “Baik” karena berada di atas rata-rata seluruh provinsi di Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota bahkan kelurahan/desa dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Peningkatan pendapatan semestinya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, setidaknya yang diukur dari peningkatan usia harapan hidup, lama pendidikan, dan pendapatan. Namun demikian perlu dianalisis lebih lanjut mengapa peningkatan IPM di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, yang mungkin terjadi karena adanya perbedaan jumlah penduduk, perbedaan luas wilayah, atau perbedaan kebijakan pembangunan. .

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, Kurnia Sari, 2017, *70 Persen Penduduk Indonesia di Jawa, tapi Tanahnya cuma 6Persen*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/11/181303426/70.persen.penduduk.indonesia.di.jawa.tapi.tanahnya.cuma.6.persen>, diakses 21 September 2018, pukul 16.30 WIB.
- Badan Pusat Statistik, - , *Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2010-2017 (Metode Baru)*, diunduh dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>, tanggal 28 Juni 2018 pukul 11.10 WIB.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2017, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2017*. BPS, Jakarta.
- Dahlan, M Sopiudin, 2001, *Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan, Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi dengan Menggunakan SPSS, Seri Evidence Based Medicine 1*, Edisi 4, Jakarta, Salemba Medika.
- Iskandar, Azwar and Subekan, Achmat (2014): *Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-2012)*. Published in: Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Vol. Vol.I/, No. ISSN 0852-6737 : 79-101, Jakarta.
- Kusriyawanto.2014. *Pengaruh Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2010*. Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako. e-Jurnal Katalogis. Volume 2 Nomor 7, Juli 2014 hlm 111-123 ISSN: 2302-2019, diakses dari <https://media.neliti.com/.../155748-ID-pengaruh-penerimaan-dan-pengeluaran-peme.pdf>, tanggal 13 Juli 2018 pukul 19.22 WIB.
- Maiharyanti, Eva. 2011. *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Nanggroe Aceh Darussalam*. Medan, Universitas Sumatera Utara. Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/27991> tanggal 23 September 2015 pukul 15.32 WIB.
- Melliana, Ayunda, dan Ismaini Zain. 2013. *Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel*. Jurnal Sains dan Seni Pomits Vol. 2, No.2, (2013) 2337-3520 (2301-928X Print). Surabaya. Universitas Airlangga. Diakses dari http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/4844, tanggal 22 September 2018 pukul 15.50 WIB
- Nujum, Syamsu, dkk. 2016. *Analysis Of The Reciprocal Relationship Of Local Government Expenditure Towards Human Development Index (HDI) And Its Influence On Economic Performance In South Sulawesi*. Journal of Humanity Vol 4, No 1. Diakses dari <http://journalofhumanity.org/index.php/jh/article/view/57> pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 19.06 WIB

- Ranis, Gustav. 2005. *Human Development: Beyond the HDI*, Yale University, Frances Stewart, Oxford University diunduh dari https://www.researchgate.net/publication/44836205_Beyond_the_Human_Development_Index/download, diunduh tanggal 22 September 2018 pukul 11.09 WIB.
- Sangh, Smith. 2016. *Determinants of Human Development Index: A Cross-Country Empirical Analysis*. SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS) – volume3 issue7 July 2016. National Institute of Bank Management. Pune, India. Diunduh tanggal 22 September 2018 pukul 11.05 WIB
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Ke-5. Bandung, Alfabeta.
- Supranto, J. 2009. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Edisi Ketujuh Jilid 2. Jakarta, Erlangga.
- Rusydi, Duta Sabiila, Dewi Kusuma Wardani dan Salman A. Totalia. *Analisis Efisiensi Relatif Penggunaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012*. Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Tata Niaga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php>, diunduh tanggal 13 Juli 2018 pukul 19.22 WIB.
- Yuliani, Tutik, 2015, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur*, Jejak 8 (1) (2015): 1-88. DOI: 10.15294/jejak.v7i1, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak>, diunduh tanggal 20 Juli 2018 pukul 19.12 WIB.
- <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1181/rekapitulasi-realisasi-penerimaan-dan-pengeluaran-pemerintah-daerah-provinsi--juta-rupiah---2006-2016.html> , diunduh tanggal 28 Juni 2018 pukul 10.30 WIB.